

SKRIPSI

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS ASSET TETAP PADA BANK
BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR**

RIZAL

105730405013



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.259 Fax (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Rizal

No. Stambuk /Nim : 10573 0405013

Fakultas /Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Judul Penelitian : SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS ASSET
TETAP PADA BANK BNI SYARIAH CABANG
MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan di ujikan di depan panitia
penguji Skripsi Starta (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhamadiyah Makassar pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2018.

Makassar, Februari 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

DR. H. Ansyarif SE.M.Si.Ak.CA
NIDN.0916096601

Pembimbing II

Ismail Rasulong.SE.MM
NBM.903078

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Jurusan
Akuntansi

Ismail Badollahi., SE, M.Si, Ak.CA
NBM. 1073428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Rizal, Nim 105730405013 ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 125 Tahun 1438 H/ 2018 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji pada Hari Senin, 12 Februari 2018 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Februari 2018

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd.Rahman Rahim,SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda,MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi) (.....)
4. Penguji:
 - a. Dr. Ansyarif Khalid,SE,M,Si,Ak.CA (.....)
 - b. Muchriana Muchran,SE,M,Si,Ak,CA (.....)
 - c. Dr. H. Mahmud Nuhung, MA (.....)
 - d. Dr.Edi jusriadi,SE,MM (.....)



ABSTRAK

Rizal, Sistem Pengendalian Intern Atas Aset Tetap Pada Bank Bni Syariah Cabang Makassar, dibimbing oleh pembimbing 1 Ansyarif Khalid dan pembimbing 2 Ismail Rasulong

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Bank BNI Syariah cabang Makassar

Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang datanya dikumpulkan dari hasil wawancara, Teknik pengumpulan data adalah dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian selain menekankan peningkatan kapasitas SDM juga menekankan komite audit untuk memberikan pengawasan ganda terhadap aktivitas perusahaan menyangkut tata tertib prosedur selain itu pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai jika terdapat perubahan yang signifikan, baik dalam penggunaan aktiva atau perubahan dalam lingkungan bisnis tidak pernah dilakukan. Sementara aktivitas pengendalian diketahui bahwa setiap transaksi yang berhubungan dengan aset tetap baik itu perbaikan, pembelian, pelepasan kewenangannya selalu diinisiasi oleh direktur. Informasi dan komunikasi yang disajikan berdasarkan metode garis lurus berdasarkan PSAK serta dilakukan secara konsisten dan pemantauan pengendalian berada pada otoritas pimpinan yang bertanggungjawab penuh dalam usaha pengawasan internal terhadap aset tetap perusahaan.

Kata Kunci : Sistem, Pengendalian Intern, Aset Tetap

ABSTRACT

Rizal, Internal Control System on Fixed Assets At Bank Bni Syariah Makassar Branch, guided by supervisor 1 Ansyarif Khalid and supervisor 2 Ismail Rasulong

This study aims to determine the internal control system applied to Bank BNI Syariah Makassar branch

The method of this research is qualitative research whose data collected from interview result, data collection technique is can be done in various setting, various source, and various ways. When viewed in terms of ways or techniques of data collection, the technique of data collection can be done by observation (observation), interview (interview), and documentation. Data analysis technique used in this research is interactive model of analysis which is data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this study indicate that the control environment in addition to emphasizing capacity building of human resources also emphasizes audit committees to provide multiple oversight of the company's activities regarding the procedural rules other than that testing of the possibility of impairment if there are significant changes, either in the use of assets or changes in the business environment never done. While control activities are known that any transactions related to fixed assets, whether they are repairs, purchases, discharge of authority are always initiated by the director. Information and communications presented on a straight-line basis under PSAK are consistently carried out and control monitoring is at the sole discretion of the management authority in the internal controlling business of the Company's fixed assets.

Keywords: System, Internal Control, Fixed Assets

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun judul skripsinya adalah **"Sistem Pengendalian Intern atas Asset Tetap pada Bank BNI syariah Cabang Makassar"**.

Diawali dengan doa dan sebetulnya perjuangan, memulai studi hingga penyusunan tugas akhir dengan melewati berbagai kendala, semuanya memberikan pengalaman tersendiri bagi penulis. Pengalaman yang menjadi tenaga pendorong bagi penulis untuk meraih cita-cita. Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi lepas dari semuanya itu mengingat penulis juga masih dalam tahap belajar, tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan, namun inilah hasil maksimal yang dapat penulis berikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang merupakan sumber segala ilmu pengetahuan dan telah memberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda syahiruddin dan Ibunda jusni serta kepada kakak-kakak saya, atas segala pengorbanan, doa, dan motivasi yang telah diberikan. Terima kasih untuk kasih sayangnya, perhatian, dan didikannya.
3. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M. Si. Ak Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Dr.H.Ansyarif, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ismail Rasulong,SE.,MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pimpinan dan staf PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang telah membantu dan mengizinkan untuk mengadakan penelitian terutama buat Kak Irma.
9. Kepada teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkhusus Jurusan Akuntansi dan terkhusus lagi teman-teman AK1-13 serta sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tak sempat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca, dan menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamiin.....!

Billahi fii sabilil haq fastabiqul khaerat,,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Makassar, Februari 2018

Rizal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Sistem Pengendalian Intern	6
B. Komponen Pengendalian Internal	9
C. Keterbatasan Pengendalian Internal	13
D. Aset Tetap	15
E. Penelitian Terdahulu	19

F. Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
A. Lokasi dan waktu penelitian.....	28
B. Metode Pengumpulan Data.....	28
C. Jenis dan Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	29
E. Metode Analisis	29
F. Fokus Penelitian.....	30
IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	32
A. Sejarah PT. Bank BNI Syariah	32
B. Profil PT. Bank BNI Syariah KCP Makassar	41
C. Rincian Asset yang Dimiliki Bank BNI Syariah Berwujud dan Tidak Berwujud.....	43
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Sistem Pengendalian Intern.....	45
B. Asset Tetap Bank BNI Syariah	54
C. Penyajian Sistem Pengendalian Asset Tetap.....	55
D. Manfaat Adanya Sistem Pengendalian Intern	56
VI. SIMPULAN DAN SARAN	58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Balasan Meneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam era globalisasi dewasa ini di mana perekonomian berkembang dengan pesat, perbankan merupakan salah satu institusi yang mempunyai peran dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Masyarakat pada umumnya memandang bahwa bank adalah tempat untuk menyimpan atau meminjam uang bagi yang membutuhkan khususnya pada PT Bank Negara Indonesia (Persero).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank BUMN yang memiliki komitmen memenuhi permintaan dari masyarakat terhadap pelayanan perbankan syariah. Untuk mewujudkan visinya menjadi “universal banking”, pada tanggal 29 April 2000 BNI membuka unit usaha syariah dengan membuka 5 kantor cabang syariah di kota-kota besar yang memiliki potensi untuk tumbuhnya perbankan syariah. Saat ini BNI Syariah memiliki jaringan 26 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu dan 600 kantor cabang BNI konvensional yang selalu bekerja sama gerainya (*office channeling*).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama bank syariah, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Disamping itu, bank syariah juga berfungsi untuk mengumpulkan,

mengelola dan menyalurkan zakat infak shadaqah (ZIS) kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dalam hal produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, produk-produk tersebut sebagian besar memiliki kesamaan dengan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional. Namun, dalam penerapannya tentu berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan prinsip diantara keduanya.

Perusahaan/instansi (dalam hal ini instansi pemerintahan) sebagai suatu organisasi mempunyai berbagai kegiatan tertentu dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi, yang pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan laba yang optimal agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, memajukan serta mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih tinggi, untuk itu setiap perusahaan harus membuat keputusan bisnis yang baik. Keputusan bisnis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan, melindungi aktiva, dan mencegah penyalahgunaan sistem perusahaan yang telah di bentuk oleh perusahaan.

Umumnya setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil maupun instansi negara pasti mempunyai kas. Kas merupakan salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kas merupakan sumber atau sasaran yang paling mudah untuk disalahgunakan. Pengendalian internal yang paling memadai sangat dibutuhkan untuk melindungi kas yang ada.

Sebagaimana yang diketahui bahwa definisi Pengendalian Intern yang dikemukakan *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) adalah sebagai berikut : Pengendalian intern terdiri atas berbagai

kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga aktiva perusahaan, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Bagi sebuah perusahaan, penerapan pengendalian internal sangat penting. Pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sangat diperlukan, karena kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid (cepat dijadikan uang dan dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan tanpa pembatasan).

Manajemen mempunyai tanggung jawab paling utama dalam menjaga keamanan harta milik perusahaan serta menemukan dan mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan ataupun pemborosan pada saat perusahaan beroperasi. Manajemen terhadap kas juga bertanggungjawab terhadap pembuatan perencanaan, melakukan prosedur atau otorisasi serta menetapkan dan mengawasi suatu kegiatan melalui pengendalian internal.

Manajemen biasanya menghadapi dua masalah akuntansi untuk transaksi kas, yaitu pengendalian internal harus ditetapkan untuk menjamin bahwa tidak ada transaksi yang tidak diotorisasi oleh pejabat atau karyawan, dan informasi yang diperlukan untuk manajemen kas yang ada ditangan dan transaksi harus tersedia.

Melindungi kas dan menjamin keakuratan catatan akuntansi untuk kas dalam pengendalian internal yang efektif atas kas merupakan suatu keharusan. Pengendalian internal yang baik menghindari terjadinya penyelewengan seperti melakukan

perubahan laporan atau perhitungannya, adanya prosedur pencatatan yang sesuai sehingga dapat dilakukan pengendalian yang tepat terhadap harta, utang, pendapatan dan biaya. Perangkat pengendalian canggih atau dengan di isinya sistem yang terbaik sekalipun belum tentu mampu menghindarkan kesalahan jika terdapat persekongkolan dari para karyawan untuk melakukan suatu kecurangan yang dapat menyebabkan pengendalian tersebut tidak berguna lagi. Kas merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi serta tujuan .

Berdasarkan berbagi uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik memilih judul **“Sistem Pengendalian Intern atas Aset Tetap pada BANK BNI Syariah Cabang Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat diangkat sebuah rumusan masalah yaitu “Sejauh mana pelaksanaan sistem pengendalian intern atas Aset Tetap yang diterapkan pada Bank BNI Syariah cabang Makassar”

C. Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran maka penelitian harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Bank BNI Syariah cabang Makassar”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Investor maupun calon investor

Dapat melakukan analisa terhadap pengendalian intern atas aset tetap pada Bank BNI Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pertimbangan dalam mempertahankan aset tetap, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penerapan system pengendalian dengan cara melihat prosedur-prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian dari data-data administrasi.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk seberapa besar pentingnya sistem pengendalian intern untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong kebijakan manajemen yang telah digariskan.”

3. Mahasiswa

Diharapkan mampu memberikan tambahan referensi khususnya mengenai system pengendalian intern atas aset tetap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manager. Satu hal yang harus dipahami, bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dan disertai pelurusan (tindakan korektif), maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali.

Pengendalian intern merupakan metode yang berguna bagi manajemen untuk menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja (Anggreini, 2012). Pada umumnya, perusahaan menggunakan sistem pengendalian internal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem dan membantu operasional perusahaan agar dapat terarah dengan baik (Chung, 2015). Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer (Mulyadi, 2014).

Perusahaan/instansi (dalam hal ini instansi pemerintahan) sebagai suatu organisasi mempunyai berbagai kegiatan tertentu dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi, yang pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan laba yang optimal agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, memajukan serta mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih tinggi, untuk itu setiap perusahaan harus membuat keputusan bisnis yang baik. Keputusan bisnis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan, melindungi aktiva, dan mencegah penyalahgunaan sistem perusahaan yang telah di bentuk oleh perusahaan.

Umumnya setiap perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil maupun instansi negara pasti mempunyai kas. Kas merupakan salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kas merupakan sumber atau sasaran yang paling mudah untuk disalahgunakan. Pengendalian internal yang paling memadai sangat dibutuhkan untuk melindungi kas yang ada.

Sebagaimana diketahui bahwa definisi Pengendalian Intern yang dikemukakan *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) adalah Pengendalian intern terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga aktiva perusahaan, memastikan akurasi dan keandalan catatan serta informasi akuntansi, mendorong

efisiensi dalam operasional perusahaan, dan mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen.

Menurut Mulyadi (2014), sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai berikut : “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.”

Tujuan dari pengendalian internal menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2011) adalah sebagai berikut :

- a. Keandalan laporan keuangan Umumnya, pengendalian yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit jika kedua tujuan tersebut berkaitan 10 dengan data yang dievaluasi dan digunakan auditor dalam prosedur audit. Sebagai contoh, pengendalian yang berkaitan dengan data non keuangan yang digunakan oleh auditor dalam prosedur analitik.

B. Komponen Pengendalian Internal

Menurut Kumaat (2011), sejalan dengan waktu, semakin didasari adanya berbagai faktor yang masih perlu diartikulasikan lebih jauh, seperti faktor manusia yang saling berinteraksi dalam lingkungan bisnis yang membentuk tata nilai perusahaan, adanya risiko intrinsik atau risiko potensial yang kurang terbaca pada historical/current data, dan kelemahan/kelemahan komunikasi internal. Jadi, sejak tahun 1992 COSO (*The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) memperkenalkan kerangka pengendalian yang terdiri dari 5 unsur sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian melingkupi sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal organisasi.
2. Penilaian risiko Semua organisasi menghadapi risiko, yaitu dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis maupun non bisnis.
3. Prosedur pengendalian Prosedur pengendalian ditetapkan untuk standarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi keterbatasan serta kesalahan.
4. Pemantauan Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat di monitor secara efektif melalui penilaian khusus atau sejalan dengan manajemen.

5. Informasi dan komunikasi Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen, untuk pedoman operasi dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

Unsur Pengendalian Internal Menurut Mulyadi (2014), unsur pokok sistem pengendalian internal adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:
 - a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
 - b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 12 Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Sistem otorisasi akan menjamin

dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
 - a) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang
 - b) Pemeriksaan mendadak
 - c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi.
 - d) Perputaran jabatan.
 - e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.
 - f) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.
 - g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Diantara 4 unsur pokok pengendalian internal tersebut diatas, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang

lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal yang mendukungnya.

Pihak yang Bertanggung Jawab Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Auditing (2014) menyatakan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

- 1) Manajemen Manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menyelenggarakan secara efektif pengendalian internal organisasinya.
- 2) Dewan komisaris dan komite audit Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal.
- 3) Auditor intern Bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi memadai atau tidaknya pengendalian internal entitas dan membuat rekomendasi peningkatannya.
- 4) Personel lain entitas Peran dan tanggung jawab semua personel lain yang menyediakan informasi atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh pengendalian internal harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik.
- 5) Auditor independen Sebagai bagian dari prosedur auditnya terhadap laporan keuangan, auditor dapat menemukan kelemahan pengendalian internal kliennya,

sehingga ia dapat mengkomunikasikan temuan auditnya tersebut kepada manajemen, komite audit atau dewan komisaris.

- 6) Pihak luar lain Pihak luar lain yang bertanggung jawab atas pengendalian internal entitas adalah badan pengatur, seperti Bank Indonesia dan Bapepam.

C. Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Auditing (2014), terdapat 5 keterbatasan atas pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

- a) Kesalahan dalam pertimbangan Manajemen dan personel lain sering kali salah paham dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.
- b) Gangguan-gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan.
- c) Kolusi Tindakan bersama dalam individu untuk tujuan kejahatan tersebut disebut sebagai kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh sistem pengendalian internal yang dirancang.
- d) Pengabaian oleh manajemen Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan

pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu.

- e) Biaya lawan manfaat Biaya yang diperlukan untuk diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian internal.

Bagi sebuah perusahaan, penerapan pengendalian internal sangat penting. Pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sangat diperlukan, karena kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid (cepat dijadikan uang dan dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan tanpa pembatasan).

Manajemen mempunyai tanggung jawab paling utama dalam menjaga keamanan harta milik perusahaan serta menemukan dan mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan ataupun pemborosan pada saat perusahaan beroperasi. Manajemen terhadap kas juga bertanggungjawab terhadap pembuatan perencanaan, melakukan prosedur atau otorisasi serta menetapkan dan mengawasi suatu kegiatan melalui pengendalian internal.

Pengendalian internal yang baik menghindari terjadinya penyelewengan seperti melakukan perubahan laporan atau perhitungannya, adanya prosedur pencatatan yang sesuai sehingga dapat dilakukan pengendalian yang tepat terhadap harta, utang, pendapatan dan biaya. Perangkat pengendalian canggih atau sistem

yang terbaik sekalipun belum tentu mampu menghindarkan kesalahan jika terdapat persekongkolan dari para karyawan untuk melakukan suatu kecurangan yang dapat menyebabkan pengendalian tersebut tidak berguna lagi. Kas merupakan faktor penting dalam mendukung tercapainya visi dan misi serta tujuan .

D. Aset Tetap

Aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Masa manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan. Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan (*non depreciable*) dan aktiva yang dapat disusutkan (*depreciable*) mencakup tanah, bangunan, mesin serta peralatan lainnya, ataupun sumber-sumber alam. Aktiva tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan." (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Aktiva Tetap dan Aktiva lain-lain). Sedangkan untuk pengakuannya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 tentang Pengakuan Aktiva Tetap dan Aktiva LainLain, menyatakan suatu barang modal untuk diakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap maka harus dipenuhi syarat berikut:

- 1) Besar kemungkinan (*probable*) bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Dalam menentukan suatu pos memenuhi kriteria pertama untuk pengakuan, suatu perusahaan harus menilai tingkat kepastian aliran manfaat keekonomian masa yang akan datang berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. adanya kepastian yang cukup bahwa manfaat perekonomian masa yang akan datang akan mengalir ke perusahaan membutuhkan suatu kepastian bahwa perusahaan akan menerima imbalan dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika resiko dan imbalan telah diterima perusahaan. Sebelum hal ini terjadi, transaksi untuk memperoleh aktiva biasanya dapat dibatalkan tanpa sanksi yang signifikan, dan karenanya aktiva tidak diakui.
- 2) Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Kriteria kedua untuk pengakuan biasanya dapat dipenuhi langsung karena transaksi pertukaran mempunyai bukti pembiayaan aktiva yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aktiva dikonstruksi sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat dibuat dari transaksi dengan pihak eksternal dan perusahaan untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan input lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 3) Aktiva yang digunakan dalam operasi/kegiatan utama perusahaan dan tidak untuk dijual.
- 4) Memiliki umur ekonomi yang panjang, biasanya lebih dari satu tahun dan disusutkan nilainya; dan

5) Memiliki bentuk fisik yang aktual.

Kelompok Aktiva Tetap Menurut Lumbantoruan (1996), aktiva tetap dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

- a) Aktiva tetap berwujud (*plant asset atau tangible asset*) - Merupakan aktiva berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan secara terus menerus. Contoh: mesin, gedung, peralatan.
- b) Aktiva tetap tak berwujud (*intangible asset*) - Merupakan aktiva yang tidak dapat langsung dilihat, bukti keberadaannya hanya dilihat dari akte perjanjian kontrak. Contoh : goodwill, patent, franchise, dan lainlain.

Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Menurut Suandy (2008) penyusutan adalah : “Alokasi sistematis suatu nilai asset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi.” Menurut Suandy (2008), adapun beberapa persyaratan aktiva tetap yang dapat disusutkan menurut ketentuan perpajakan meliputi:

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas.
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 17, penyusutan didefinisikan dengan lebih jelas, yaitu sebagai berikut: "Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi".

Perusahaan mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk klasifikasi di atas sebagai aset tidak lancar. Termasuk klasifikasi aset antara lain: Kas, alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan Bank, sisa rekening giro perusahaan yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan Surat-surat berharga, aset yang memiliki sifat (a) mempunyai pasar dan dapat diperjual belikan dengan segera (b) dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu dekat bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan umum perusahaan; dan (c) tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain Piutang usaha. Piutang usaha (hasil penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan) dan piutang lain-lain (hasil transaksi di luar kegiatan usaha).

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fisik harus dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu : (Suandy, 2008)

- a. Harta berwujud kelompok bukan bangunan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995 Tanggal 7 Februari 1995 yang mengatur tentang pengelompokkan jenis-jenis harta berwujud yang telah 21 diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Tanggal 14 Desember 2002 diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 138/KMK.03/2002 Tanggal 8 April 2002 ditetapkan.

- b. Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan Berdasarkan Masa Manfaat.
Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Kelompok I 4 Tahun Kelompok II 8
Tahun Kelompok III 16 Tahun Kelompok IV 20 Tahun Sumber: Suandy (2008)

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengkaji dan berhubungan dengan penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Intern atas Asset tetap pada Bank BNI Syariah terdapat bukti empiric menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Nurmala (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian Intern terhadap prosedur pemberian kredit griya pada BNI LNC sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bagaimana ketat dan selektifnya prosedur dalam menilai dan menyeleksi calon nasabah sebelum yang mau akad kredit disetujui oleh pihak bank, namun masih perlu ditingkatkan lagi penerapan standar oprasional khususnya bagi Petugas dalam melakukan survey lapangan terhadap calon nasabah maupun physic rumah yang akan diambil karena belum ada petugas khusus, tapi ditunjuk berdasarkan situasi dan kondisi sumber daya manusia yang ada saja pada saat survey dilakukan.

Raga Fahmy Darmawan (2015), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hasil analisis terhadap unsur-unsur system pengendalian intern pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buleleng menunjukkan bahwa system pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Sudah ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam struktur organisasinya, sistem otorisasi prosedur

pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap organisasi. (2) Analisis yang dilakukan untuk tiap elemen sistem pengendalian intern pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buleleng yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan tersebut dikatakan efektif.

Farikhah Ilmih Syakiah (2014), hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *musyarakah* untuk pemberian modal kerja sudah berjalan dengan baik dan mendukung adanya pengendalian intern. Akan tetapi pada tahap permohonan, pengumpulan data, verifikasi data, analisa laporan keuangan, penilaian risiko, dan analisa proyeksi keuangan dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh SME *Account Officer* (SAO) tanpa campur tangan SME *Financing Head* (SFH) yang merupakan atasan dari SAO untuk mencegah adanya praktik tidak sehat dalam proses pelaksanaannya. Sehingga perlu ditingkatkan *internal check* terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi terkait.

Stepani Sisca Wulandari (2013), Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aplikasi BISAIL yang ada di Direktorat Logistik akan cukup baik sejauh ini. Namun, akan lebih baik jika didukung oleh pengguna mampu menggunakan sistem dengan baik. implementasi sistem BISAIL masih aplikasi yang berdiri sendiri dan tidak terintegrasi dengan Main Ledger BI-SOSA. Ketika penelitian ini dilakukan, Bank Indonesia berada di tengah-tengah proyek untuk mengintegrasikan BISAIL ke buku besar dan sistem pajak utama di Bank Indonesia.

Silviana Putriandini, Gugus Irianto (2012), Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai konvensional melekat pada pembiayaan *musyarakah* yang berbasis syariah. Nilai-nilai konvensional tersebut yaitu nilai ketidakpercayaan (*su'udzon*), nilai kewaspadaan dan nilai ketidakjujuran. melekatnya ketiga nilai tersebut disebabkan oleh keinginan bank untuk mencapai laba maksimal (*profit oriented*).

JMV. Mulyadi (2015) , Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 bank besar tersebut masih ditemukan inefisiensi. DEA menghasilkan rekomendasi pengembangan yang dapat dilakukan bank untuk mencapai efisiensi optimum. Berdasarkan rekomendasi tersebut diharapkan bank dapat memaksimalkan profit yang diinginkan melalui efisiensi.

Ira Ikasa Putri (2013), Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.

Evi Alfiya, Mohammad Heykal (2014), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan praktiknya dan penerapan pencatatan dan penjurnalan pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk belum sesuai dengan PSAK 105.

Dari berbagai hasil penelitian di atas maka dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.I
Jurnal Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Nurmala (2015)	Analisa Pengendalian Intern terhadap Prosedur pemberian Kredit Griya BNI LNC Palembang	Pengendalian intern, Prosedur, kredit	Regresi berganda	hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian Intern terhadap prosedur pemberian kredit griya pada BNI LNC sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bagaimana ketat dan selektifnya prosedur dalam menilai dan menyeleksi calon nasabah sebelum yang mau akad kredit disetujui oleh pihak bank, namun masih perlu ditingkatkan lagi penerapan standar oprasional khususnya bagi Petugas dalam melakukan survey lapangan terhadap calon nasabah maupun physic rumah yang akan diambil karena belum ada petugas khusus, tapi ditunjuk berdasarkan situasi dan kondisi sumber daya manusia yang ada saja pada saat survey dilakukan.
2.	Raga Fahmy Darmawan, (2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pembiayaan Implan pada PT. Bank Syariah Mandiri (Studi	Sistem Pengendalian Intern, Pembiayaan Implan	Regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hasil analisis terhadap unsur-unsur system pengendalian intern pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu

		Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Buleleng)			buleleng menunjukkan bahwa system pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Sudah ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam struktur organisasinya, sistem otorisasi prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap organisasi. (2) Analisis yang dilakukan untuk tiap elemen sistem pengendalian intern pada PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu buleleng yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan tersebut dikatakan efektif.
3.	Farikhah Ilmih Syakiah (2014)	Pengendalian Intern pada Prosedur Pembiayaan Musyarakah untuk pemberian Modal Kerja	Pengendalian Intern, Prosedur Pembiayaan , Modal Kerja	regresi linier berganda	hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan <i>musyarakah</i> untuk pemberian modal kerja sudah berjalan dengan baik dan mendukung adanya pengendalian intern. Akan tetapi pada tahap permohonan, pengumpulan data, verifikasi data, analisa laporan keuangan, penilaian risiko, dan analisa proyeksi keuangan dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh SME <i>Account Officer</i> (SAO) tanpa campur tangan SME <i>Financing Head</i> (SFH) yang merupakan

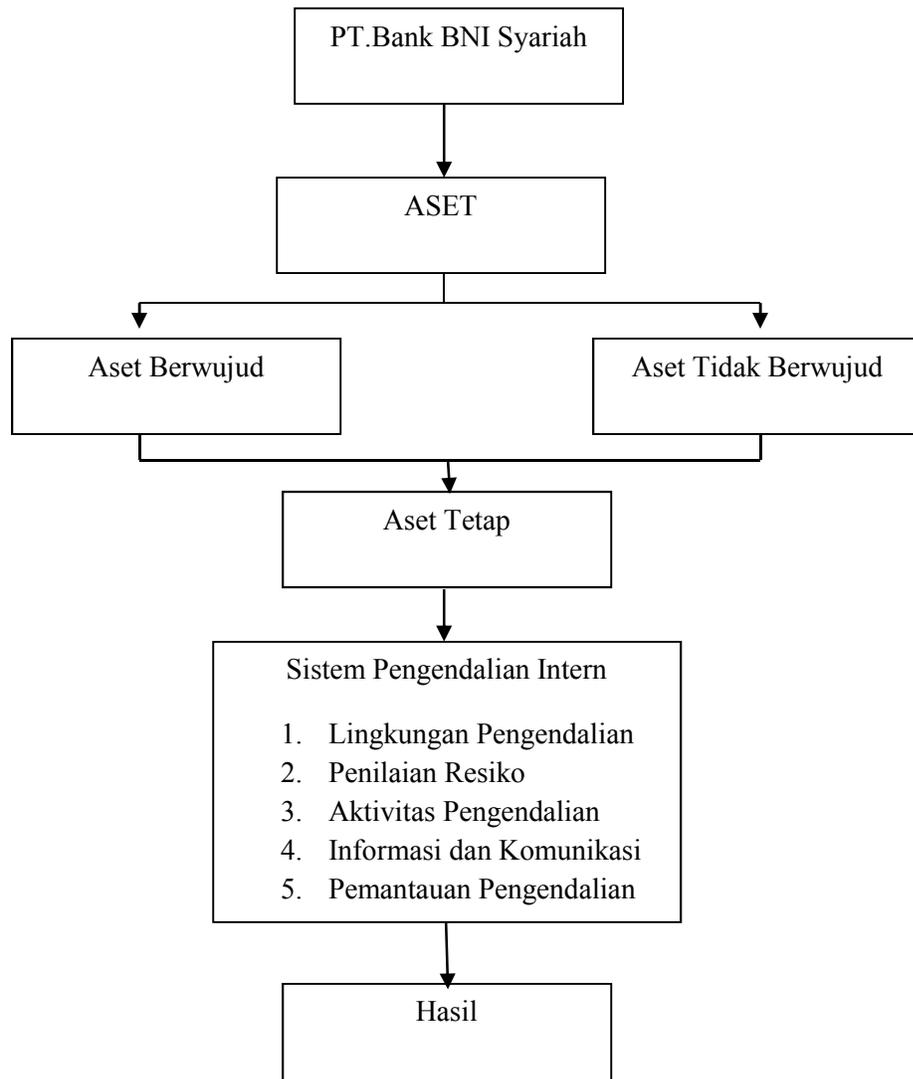
					atasan dari SAO untuk mencegah adanya praktik tidak sehat dalam proses pelaksanaannya. Sehingga perlu ditingkatkan <i>internal check</i> terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi terkait.
4.	Stepani Sisca Wulandari (2013)	Identifikasi risiko pengendalian intern dan evaluasi SIA aset tetap pada BANK Indonesia	Sistem Informasi Akuntansi, Aset Tetap <i>Cycle</i> , Internal Control.	analisis regresi berganda	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aplikasi BISAIL yang ada di Direktorat Logistik akan cukup baik sejauh ini. Namun, akan lebih baik jika didukung oleh pengguna mampu menggunakan sistem dengan baik. implementasi sistem BISAIL masih aplikasi yang berdiri sendiri dan tidak terintegrasi dengan Main Ledger BI-SOSA. Ketika penelitian ini dilakukan, Bank Indonesia berada di tengah-tengah proyek untuk mengintegrasikan BISAIL ke buku besar dan sistem pajak utama di Bank Indonesia.
5.	Silviana Putriandini, Gugus Irianto (2012)		Nilai-nilai konvensional, system pengendalian internal, pembiayaan musyarakah, fenomenologi	regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai konvensional melekat pada pembiayaan <i>musyarakah</i> yang berbasis syariah. Nilai-nilai konvensional tersebut yaitu nilai ketidakpercayaan (<i>su'udzon</i>), nilai kewaspadaan dan nilai ketidakjujuran. melekatnya ketiga nilai tersebut

					disebabkan oleh keinginan bank untuk mencapai laba maksimal (<i>profit oriented</i>).
6.	JMV. Mulyadi (2015)	Penilaian Efisiensi Bank dengan Data Envelopment Analysis pada 10 Bank Berperingkat Besar Di Indonesia	analisis meyampul data, input, output, produksi Pendekatan, intermediasi Pendekatan, pendapatan Pendekatan dan laba pendekatan.	regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 bank besar tersebut masih ditemukan inefisiensi. DEA menghasilkan rekomendasi pengembangan yang dapat dilakukan bank untuk mencapai efisiensi optimum. Berdasarkan rekomendasi tersebut diharapkan bank dapat memaksimumkan profit yang diinginkan melalui efisiensi.
7.	Ira Ikasa Putri (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak	Perlakuan akuntansi, pembiayaan gadai syariah	regresi berganda	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.
8.	Evi Alfiya, Mohammad Heykal (2014)	Analisa Pengendalian Internal Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk	pengendalian internal, pembiayaan mudharabah, PSAK No.105, standar COSO	Regresi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan yang dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan praktiknya dan penerapan pencatatan dan penjurnalan pembiayaan mudharabah yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kebon Jeruk belum sesuai dengan PSAK 105.

F. Kerangka pikir

Kerangka pikir merupakan alur sederhana yang mendeskripsikan pola hubungan variable penelitian atau prosedur kerja peneliti untuk memecahkan penelitian, alur sederhana ini dapat berupa gambar . Dalam penelitian ini alur sederhana tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.I
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian di PT. BANK BNI Syariah cabang Makassar yang beralamat di Jl. Andi Pangeran Pettarani-Komp. Ruko Business Center- Sardony No. 1/2- Panakkukang Makassar, sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan, yang di rencanakan pada bulan Mei sampai bulan Juli 2017.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa sistem pengendalian aset tetap. Teknik pengumpulan data adalah dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi Sugiyono (2014), Sumber data penelitian ini berasal dari segala informasi yang di dapatkan dari objek penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer yang terdiri dari data yang bersifat kualitatif dari 1 perusahaan Bank BNI Syariah yang ada di kota Makassar.

2. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber yaitu: Data primer berasal dari hasil wawancara terhadap informan dan data yang diperlukan dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertama. Jadi data diperoleh dari sumber data kedua, ketiga dan seterusnya atau sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui lebih mendalam mengenai aset tetap perusahaan. Di mana yang dimaksud disini adalah informan yang diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun informan dari peneliti ini yakni Informan adalah meliputi karyawan bagian SDM dan pimpinan yang merupakan karyawan PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Dengan jumlah informan seluruhnya adalah 5 orang.

E. Metode Analisis

Setelah tahap pengumpulan data selesai, maka dilanjutkan dengan pengelolaan data. Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan

sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif (*interactive model of analysis*). Dalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diuraikan untuk menjadikan penelitian ini terarah untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut.
2. Penilaian resiko menekankan pada metode sistematis dalam melihat aktivitas kerja, memikirkan apa yang dapat menjadi buruk, dan memutuskan kendali yang cocok untuk mencegah terjadinya kerugian, kerusakan, atau cedera di tempat kerja.
3. Aktivitas pengendalian menunjukkan usaha perusahaan untuk mengidentifikasi resiko yang sedang dihadapi.
4. Informasi dan Komunikasi, adalah penyampaian pesan yang mencakup memproses dan menyampaikan informasi dalam perusahaan.
5. Pemantauan Pengendalian Intern dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aset tetap.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. Bank BNI Syariah

Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI menjadi bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Uang Republik Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia.

Menyusul penunjukan De Javasche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai bank sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peran BNI sebagai bank sentral. BNI lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa pada tahun 1950 dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Kantor cabang BNI pertama di luar negeri dibuka di Singapura pada tahun 1955.

Peranan BNI untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan berbagai

layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank Keliling, Bank Bocah dan Bank Sarinah. Tujuan utama dari pembentukan Bank Terapung adalah untuk melayani masyarakat yang tinggal di kepulauan seperti di Kepulauan Riau atau daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat seperti Kalimantan. BNI juga meluncurkan Bank Keliling, yaitu jasa layanan perbankan di mobil keliling sebagai upaya proaktif untuk mendorong masyarakat menabung Sesuai dengan UU No.17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia 1946, BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Segmentasi nasabah juga telah dibidik BNI sejak awal dengan dirintisnya bank yang melayani khusus nasabah wanita yaitu Bank Sarinah di mana seluruh petugas bank adalah perempuan dan Bank. Bocah yang memberikan edukasi kepada anak-anak agar memiliki kebiasaan menabung sejak dini. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga oleh anak-anak. Bahkan sejak 1963, BNI telah merintis layanan perbankan di perguruan tinggi saat membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan. Saat ini BNI telah memiliki kantor layanan hampir di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia.

Dalam masa perjalanannya, BNI telah mereposisi identitas korporatnya untuk menyesuaikan dengan pasar keuangan yang dinamis. Identitas pertama sejak BNI berdiri berupa lingkaran warna merah dengan tulisan BNI 1946 berwarna emas melambangkan persatuan, keberanian, dan patriotisme yang memang

merefleksikan semangat BNI sebagai bank perjuangan. Pada tahun 1988, identitas korporat berubah menjadi logo layar kapal & gelombang untuk merepresentasikan posisi BNI sebagai Bank Pemerintah Indonesia yang siap memasuki pasar keuangan dunia dengan memiliki kantor cabang di luar negeri. Gelombang mencerminkan gerak maju BNI yang dinamis sebagai bank komersial Negara yang berorientasi pada pasar.

Setelah krisis keuangan melanda Asia tahun 1998 yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, BNI melakukan program restrukturisasi termasuk diantaranya melakukan *rebranding* untuk membangun & memperkuat reputasi BNI. Identitas baru ini dengan menempatkan angka „46“ di depan kata „BNI“. Kata „BNI“ berwarna tosca yang mencerminkan kekuatan, keunikan, dan kekokohan. Sementara angka „46“ dalam kotak orange diletakkan secara diagonal untuk menggambarkan BNI baru yang modern.

Tempaan krisis moneter tahun 1998 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya. UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

2. Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah

BNI Syariah mempunyai visi untuk menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Untuk mencapai visi tersebut, BNI Syariah mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Produk dan Jasa PT. Bank BNI Syariah

Pada dasarnya produk-produk yang umum terdapat di perbankan konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam juga terdapat di BNI Syariah. Untuk produk dana, di BNI Syariah juga terdapat produk-produk umum seperti giro, deposito dan tabungan.

A. Produk Dana :

- a) Tabungan iB Plus, adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah. Dengan prinsip ini tabungan anda akan diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai dengan prinsip syariah.

- b) Tabungan iB Prima, adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. Mudharabah muthlaqah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati. Dalam hal ini, mudharib (bank) berkuasaan penuh untuk mengelola modal atau menentukan arah investasi sesuai syariah.
- c) BNI iB Tabungan adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- d) BNI iB Haji, merupakan produk tabungan yang dikhususkan untuk memenuhi Ongkos Naik Haji (ONH) yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah. BNI iB Haji telah tergabung dalam layanan online SSKOHAT (Sistem Koordinasi Haji Terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Departemen Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.
- e) BNI iB Giro, merupakan produk yang memberikan segala kemudahan bertransaksi Giro yang menggunakan prinsip Wadiah

Yadh Dhamanah. Giro Syariah mendukung usaha customer dengan kemudahan on-line pada cabang-cabang BNI di seluruh Indonesia.

- f) BNI iB Deposito, menggunakan prinsip Mudharabah Mutlaqah, BNI iB Deposito mengelola dana masyarakat dengan cara disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif maupun pembiayaan konsumtif yang halal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
- g) BNI iB Tapenas, merencanakan dan mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin untuk buah hati adalah sebuah tindakan bijaksana. BNI Syariah membantu masyarakat untuk menyiapkan pendidikan melalui BNI iB Tapenas. Dengan setoran sesuai kemampuan dan perlindungan asuransi, BNI iB Tapenas dapat membantu masyarakat mewujudkan rencana masa depan keluarga yang lebih baik.

B. Produk Pembiayaan :

- a. BNI iB Griya, melalui pembiayaan BNI iB Griya nasabah dapat mewujudkan kebutuhan perumahan, kavling siap bangun ataupun renovasi rumah. Pembayaran dengan cara diangsur dalam periode waktu sampai dengan 15 tahun. Bentuk pembiayaan adalah jual beli atau ijarah.
- b. BNI iB Oto, merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan proses yang mudah dan cepat berdasarkan syariah. Uang muka relatif ringan dan pembayaran dapat dilakukan secara debet otomatis.

- c. BNI iB Multijasa, adalah pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa misalnya pembiayaan untuk jasa pernikahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, wisata umroh/haji, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah, dengan menggunakan akad ijarah. Akad ijarah adalah sewa menyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakan.
- d. BNI iB Wirausaha, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha Anda, dengan besarnya pembiayaan dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta yang diproses lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan prinsip syariah.
- e. BNI iB Tunas Usaha, adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah.
- f. BNI iB Gadai Emas, merupakan pembiayaan dengan jaminan berupa emas (lantakan atau perhiasan) yang secara fisik dikuasai oleh Bank. Proses pembiayaan cepat dan sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan dana jangka pendek untuk kebutuhan yang mendesak.
- g. BNI iB Multiguna, adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) dan atau fixed asset yang ditujukan untuk

kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

- h. BNI iB Pembiayaan Usaha Kecil, pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pengusaha kecil sampai dengan Rp 10 miliar berdasarkan prinsip murabahah, musyarakah, mudharabah dan ijarah.

C. Produk Jasa :

- a. Kiriman uang, berdasarkan prinsip wakalah.
- b. Garansi Bank berdasarkan prinsip kafalah.
- c. Clean Collection, pelayanan yang diberikan BNI Syariah untuk mendapatkan pembayaran atas dokumen atau surat berharga dari pihak ketiga di luar negeri.
- d. Money Changer. Inkaso, Pengiriman surat/dokumen berharga untuk ditagihkan pembayarannya kepada pihak yang menerbitkan/ditentukan (tertarik dalam surat atau dokumen berharga tersebut).

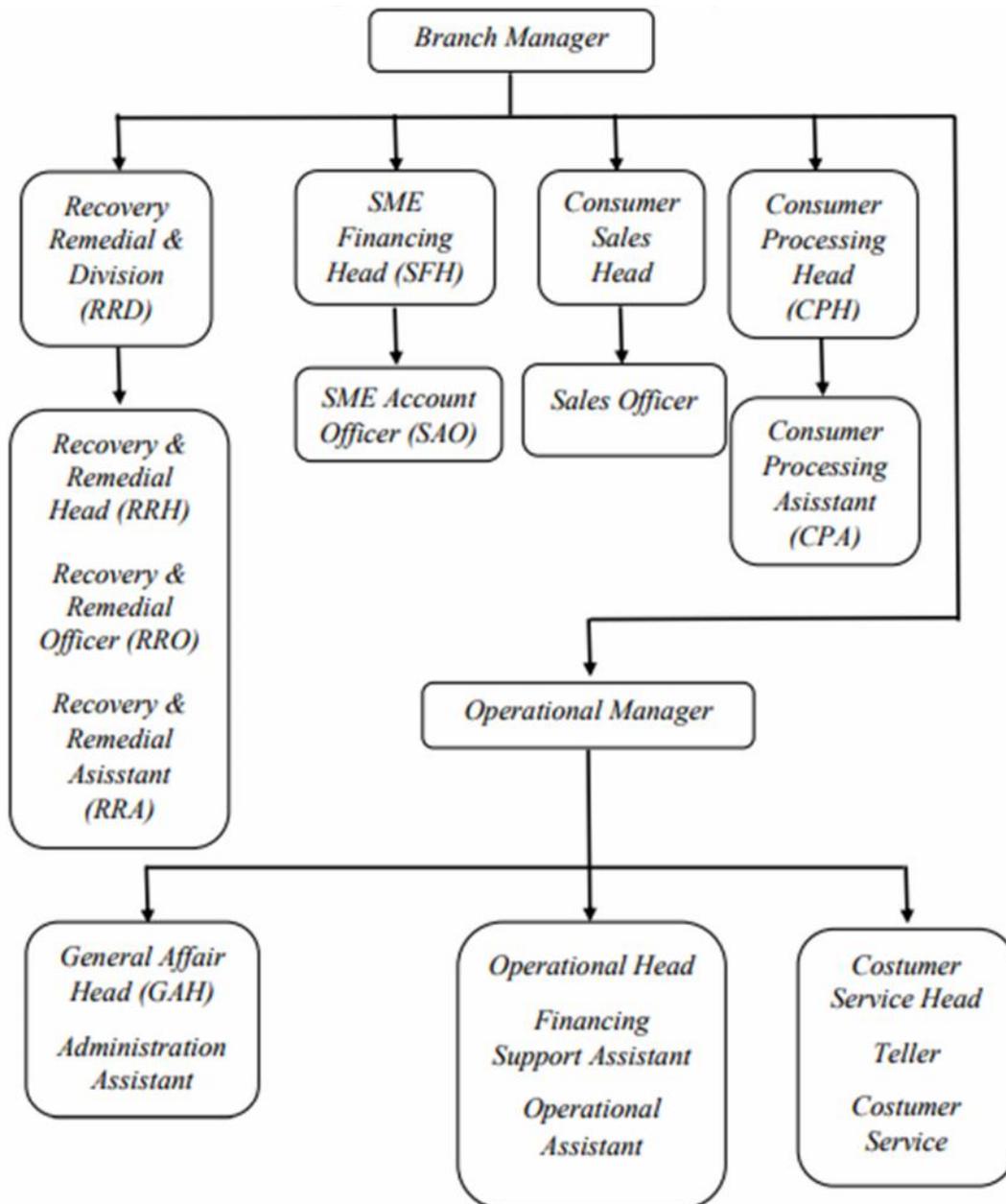
B. Profil PT. Bank BNI Syariah KCP Makassar

Seiring dengan semakin berkembangnya perbankan syariah maka banyak dari bank-bank swasta maupun negeri membuka layanan dengan prinsip syariah seperti halnya PT. Bank BNI Syariah. PT. Bank BNI Syariah saat ini telah membuka Kantor Cabang Pembantu di Makassar. BNI Syariah Makassar meresmikan kantor baru di Jl Sam Ratulangi Makassar.

Kantor Cabang BNI Makassar melakukan relokasi tempat yang sebelumnya terletak di Jalan AP Pettarani Makassar. Peresmian ini dihadiri langsung Dirut BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo, Kepala Kantor OJK Regional 6 Sulampua Bambang Kiswono, dan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Numang. Juga sejumlah pejabat dari Kantor Cabang BNI Syariah. Kehadiran kantor baru ini diharapkan bisa semakin meningkatkan kualitas layanan yang akan berefek peningkatan bisnis perusahaan. Potensi bisnis di Sulsel menjanjikan dengan pertumbuhan ekonomi yang di atas nasional. Hadirnya kantor ini akan semakin meningkatkan kualitas layanan.

Karena itu dengan bertambahnya bank yang membuka kantor di Makassar termasuk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ratulangi dapat memberikan sporting bagi masyarakat Makassar kearah positif dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Makassar.

Gambar 4.1 Bagian Struktur Organisasi
PT. Bank Bni Syariah KCP Makassar



C. Rincian Asset yang dimiliki Bank BNI Syariah Berwujud & Tidak berwujud

Direktur Utama BNI Syariah, Imam Teguh Saptono menerima penghargaan Bank Syariah Terbaik 2016 kategori aset diatas sepuluh Triliun Rupiah dari majalah Investor di Soehanna Hall – Energy.

BNI Syariah raih The Best Syariah 2016 versi Majalah Investor. Acara ini diselenggarakan oleh Majalah Investor bertajuk 11th The Best Syariah Bank 2016 sebagai apresiasi bagi para pelaku industri syariah baik perbankan, asuransi maupun reksadana. Penghargaan ini diterima oleh Direktur Utama BNI Syariah, Imam Teguh Saptono.

Di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil, BNI Syariah berhasil melewatinya dengan baik. Pertumbuhan bisnis di tahun ini tak lepas dari sinergi BNI Syariah dengan yang ditawarkan induk melalui BNI Financial Services melalui peningkatan layanan, produk dan teknologi yang sama dengan induk.

Dengan tetap mengusung Hasanah, BNI Syariah terus berkomitmen untuk menjadi yang terbaik sesuai kaidah.

Kinerja BNI Syariah Triwulan 2 – 2016, BNI Syariah melewati semester pertama di tahun 2016 dengan cukup baik, tercatat profitabilitas semester pertama 2016 tercapai sebesar Rp 145,65 Miliar atau naik sebesar 45,73% dibanding tahun sebelumnya Juni 2015 sebesar Rp 99,94 Miliar. Pertumbuhan laba tersebut disokong oleh ekspansi pembiayaan yang terjaga kualitasnya dan di sisi lain, hal ini

dikontribusikan oleh rasio dana murah yang lebih baik serta efisiensi operasional yang juga terus membaik.

Dari sisi neraca BNI Syariah juga mengalami peningkatan asset dari posisi Juni 2015 sebesar Rp 20,85 Triliun menjadi Rp 25,68 Triliun yang didukung oleh Pertumbuhan aset ini didorong oleh pertumbuhan YoY pada pembiayaan sebesar 13,36% dan DPK sebesar 26,05% terhadap Juni tahun 2015.

Pembiayaan pada Juni 2015 sebesar Rp 16,74 Triliun berhasil tumbuh menjadi Rp 18,98 Triliun pada Juni tahun 2016 dengan strategi kontrol kualitas pembiayaan sehingga NPF terjaga pada posisi 2.8% dibawah rata-rata industri.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga yang pada Juni tahun lalu sebesar Rp 17,32 Triliun meningkat menjadi Rp 21,83 Triliun pada Juni 2016, dengan rasio dana murah (CASA) sebesar 47,12 %.

Dari total pembiayaan sebesar Rp 18,98 Triliun tersebut, sebagian besar merupakan pembiayaan konsumen yaitu 52,96%, disusul pembiayaan ritel produktif/SME sebesar 22,78%, pembiayaan komersial sebesar 16,38%, pembiayaan mikro sebesar 5,77%, dan kartu pembiayaan Hasanah Card 2,11%. Untuk pembiayaan konsumen, maka sebagian besar portofolio merupakan BNI Griya iB Hasanah, yakni sebesar 86.02%.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. SISTEM PEGENDALIAN INTERN

pengendalian intern merupakan proses kebijaksanaan atau prosedur yang dijalankan dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan. Demikian perlunya pengendalian intern dalam sebuah lembaga sehingga hal ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin kesinambungan dan kepercayaan pihak Pemerintah. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang diterapkan Bank BNI Syariah Cabang Makassar maka dapat ditelusuri berdasarkan indikator Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan pemantauan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Pada aspek ini lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Untuk menelusuri aspek ini pada sistem pengendalian intern Bank BNI Syariah Cabang Makassar maka dilakukan wawancara dengan informan operasional manajer menjelaskan bahwa:

“lingkungan perusahaan memiliki iklim yang kondiktif karena karyawan memiliki visi dan tuujuan yang sama yaitu ingin menjadi Bank BNI Syariah sebagai salah satu bank yang terbaik dalam pelayanan dengan melakukan peningkatan kualitas SDM dan pengendalian internal perusahaan” (wawancara tanggal 21 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa lingkungan pengendalian adalah kondisi perusahaan yang kondiksif utuk mewujudkan visi dan tujuan bersama guna meningkatkan kualitas layanan dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas SDM ini yaitu dengan menempatkan program pendidikan hal ini diungkapkan consumer sales head bank BNI Syahriah Cabang Makassar yang menjelaskan bahwa:

“Perusahaan menetapkan suatu program pendidikan dan pelatihan selama tiga bulan untuk melengkapi kemampuan dasar yang berguna dalam menjalankan tugas. Sistem kontrak selama 1 tahun bagi karyawan baru yang diterapkan merupakan salah satu usaha manajemen mendorong terciptanya SDM yang baik yang bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan” (wawancara tanggal 21 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perusahaan menetapkan sistem kontrak selama 1 tahun bagi karyawan yang baru dengan program

pendidikan dan pelatihan selama tiga bulan untuk mendorong terciptanya SDM yang berkualitas dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendalam mengenai lingkungan pengendalian dapat ditelusuri melalui hasil wawancara dengan informan SME Financing Head (SFH) yang menjelaskan bahwa :

“adanya komite audit memberikan pengawasan double terhadap aktivitas perusahaan menyangkut tata tertib prosedur dan kebijakan sehingga mempengaruhi penyajian informasi laporan keuangan yang relevan karena kemungkinan untuk kesalahan pencatatan dan sistem sangat tinggi”(wawancara tanggal 22 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa terdapat komite audit memberikan pengawasan ganda terhadap aktivitas perusahaan menyangkut tata tertib prosedur sehingga mempengaruhi penyajian informasi laporan karena kemungkinan untuk kesalahan pencatatan dan sangat tinggi.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan pengendalian adalah kondisi perusahaan yang kondusif untuk mewujudkan visi dan tujuan bersama guna meningkatkan kualitas layanan dengan cara peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Disamping itu perusahaan menetapkan sistem kontrak selama 1 tahun bagi karyawan yang baru dengan program pendidikan dan pelatihan selama tiga bulan untuk mendorong terciptanya SDM yang berkualitas dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Hal yang tidak kalah penting dari lingkungan pengendalian adalah komite audit memberikan pengawasan ganda terhadap aktivitas perusahaan

menyangkut tata tertib prosedur sehingga mempengaruhi penyajian informasi laporan karena kemungkinan untuk kesalahan pencatatan dan sangat tinggi.

2. Penilaian Resiko

Pengendalian inten yang memuaskan dapat dicapai apabila semua kegiatan dilaksanakan dengan baik, untuk itu perlu adanya sistem otorisasi dan pedoman yang menggambarkan prosedur-prosedur akuntansi untuk masing-masing kegiatan. Begitu juga pada perusahaan ini dalam melakukan kegiatan operasional bank yang didasarkan oleh bukti-bukti pedoman, memorandum dan instruksi inten manajemen sehingga terciptalah suatu standar operasional unit-unit pada perusahaan tersebut sebagai suatu alat pengendalian apakah karyawan telah sampai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui penilaian resiko Bank BNI Syariah Cabang Makassar dilakukan wawancara dengan informan Consumer Processing Head (CPH) yang menjelaskan bahwa :

“untuk perusahaan ini saya rasa tidak pernah dilakukan pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai jika terdapat perubahan yang signifikan, baik dalam penggunaan aktiva atau perubahan dalam lingkungan bisnis” (wawancara tanggal 22 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai jika terdapat perubahan yang signifikan, baik dalam penggunaan aktiva atau perubahan dalam lingkungan bisnis tidak pernah dilakukan. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Consumer Processing Assistant (CPA)

Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang mengatakan bahwa :

“saya pikir perusahaan tidak melakukan perubahan untuk pengeluaran aset tetap, semua pengeluaran aset tetap dibebankan langsung pada pengeluaran pendapatan” (wawancara tanggal 26 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penilaian resiko tidak efektif karena semua pengeluaran aset tetap dibebankan langsung pada pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai jika terdapat perubahan yang signifikan, baik dalam penggunaan aktiva atau perubahan dalam lingkungan bisnis tidak pernah dilakukan hal ini memberikan dampak penilaian resiko tidak efektif karena semua pengeluaran aset tetap dibebankan langsung pada pengeluaran pendapatan.

3. Aktivitas Pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Untuk mengetahui aktivitas pengendalian maka dilakukan wawancara dengan informan SME Financing Head (SFH) yang mengemukakan bahwa :

“kalau untuk aktifitas pengendalian dilakukan berdasarkan sistem otorisasi dari pimpinan berupa perbaikan dan pembelian aset tetap dan diotorisasi oleh bagian keuangan dan Direktur” (wawancara tanggal 6 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Setiap transaksi

yang berhubungan dengan aset tetap (perbaikan, pembelian, pelepasan) selalu di otorisasi oleh direktur. Untuk mengetahui pengawasan terhadap aset tetap terkait aktivitas pengendalian tersebut maka dilakukan wawancara dengan informan Consumer Processing Asisstant (CPA) Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang mengatakan bahwa :

“Aset tetap perusahaan tidak diberikan penomoran tentu tidak efektif karena tidak bisa mendeteksi adanya kehilangan terhadap aset tetap selain itu tidak pernah dilakukan pencocokan aset tetap secara fisik dengan kartu aset tetap” (wawancara tanggal 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Aset tetap perusahaan tidak diberikan penomoran tentu tidak efektif karena tidak bisa mendeteksi adanya kehilangan terhadap aset tetap selain itu tidak pernah dilakukan pencocokan aset tetap secara fisik dengan kartu aset tetap. Pada aspek aktivitas pengendalian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Setiap transaksi yang berhubungan dengan aset tetap baik itu perbaikan, pembelian, pelepasan kewenangannya selalu diinisiasi oleh direktur. Kelemahan lainnya pada aktivitas pengendalian ini adalah Aset tetap perusahaan tidak diberikan penomoran hal ini mengakibatkan tidak bisa mendeteksi adanya kehilangan terhadap aset tetap serta tidak ada pencocokan aset fisik dengan kartu aset.

4. Informasi dan Komunikasi

Untuk mengetahui aspek informasi dan komunikasi dari Sistem pengendalian

intern yang diterapkan pada Bank BNI Syariah cabang Makassar maka dilakukan wawancara dengan informan Consumer Processing Assistant (CPA) Bank BNI Syariah Cabang Makassar yang mengatakan bahwa :

“Metode yang digunakan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) serta dilakukan secara konsisten”(wawancara tanggal 11 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa informasi disajikan berdasarkan metode garis lurus berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) serta dilakukan secara konsisten.

“kalau masalah itu Manajemen perusahaan tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaan aset tetap, yang saya tau metode Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode penyusutan metode garis lurus dengan tarif penyusutan tertentu” (wawancara tanggal 13 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Manajemen perusahaan tidak memberikan informasi tentang keberadaan aset tetap. Hal tersebut terlihat dari kurangnya kontrol untuk setiap aset tetap, sehingga aset tetap yang disajikan di dalam laporan keuangan belum menyajikan nilai buku.

Pada aspek informasi dan komunikasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi disajikan berdasarkan metode garis lurus berdasarkan PSAK (Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan) serta dilakukan secara konsisten selain itu Manajemen perusahaan tidak memberikan informasi tentang keberadaan aset tetap.

5. Pemantauan Pengendalian

Untuk dapat mengetahui terkait pemantauan pengendalian sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern atas Aset Tetap pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar maka dilakukan penelusuran wawancara dengan Consumer Sales Head yang mengatakan bahwa :

“Pimpinan perusahaan bertanggungjawab penuh dalam usaha pengawasan internal terhadap aset tetap. Manajemen perlu memperhatikan dan menentukan cara yang baik dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien agar pelaksanaan prosedur- prosedur pengawasan dapat dilaksanakan sebaik mungkin” (wawancara tanggal 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemantauan pengendalian berada pada pundak pimpinan yang bertanggungjawab penuh dalam usaha pengawasan internal terhadap aset tetap. Manajemen perlu memperhatikan dan menentukan cara yang baik dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien agar pelaksanaan prosedur-prosedur pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian hasil wawancara dengan SME Financing Head (SFH) yang menjelaskan bahwa :

“Proses pengawasan yang dilakukan terhadap aset tetap belum terorganisir dengan baik dan itu juga berdampak terhadap efisiensi dan efektivitas dan kualitas kegiatan operasional perusahaan” (wawancara tanggal 11 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses pengawasan yang dilakukan terhadap aset tetap belum terorganisir dengan baik dan itu juga berdampak terhadap efisiensi dan efektivitas dan kualitas kegiatan operasional perusahaan oleh karena itu proses pengawasan terhadap aset perlu dikoordinir dengan baik agar tidak mempengaruhi kegiatan operasional.

Pada aspek pemantauan pengendalian dapat disimpulkan bahwa pemantauan pengendalian berada pada pundak pimpinan yang bertanggungjawab penuh dalam usaha pengawasan internal terhadap aset tetap dan proses pengawasan yang dilakukan terhadap aset tetap belum terorganisir dengan baik.

Secara keseluruhan sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Bank BNI Syariah cabang Makassar menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian adalah kondisi perusahaan yang kondusif untuk mewujudkan visi dan tujuan bersama guna meningkatkan kualitas layanan dengan cara peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Disamping itu perusahaan menetapkan sistem kontrak selama 1 tahun bagi karyawan yang baru dengan program pendidikan dan pelatihan selama tiga bulan untuk mendorong terciptanya SDM yang berkualitas dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

lingkungan pengendalian juga menekankan komite audit untuk memberikan

pengawasan ganda terhadap aktivitas perusahaan menyangkut tata tertib prosedur sehingga mempengaruhi penyajian informasi laporan karena kemungkinan untuk kesalahan pencatatan dan sangat tinggi. Kemudian pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai jika terdapat perubahan yang signifikan, baik dalam penggunaan aktiva atau perubahan dalam lingkungan bisnis tidak pernah dilakukan hal ini memberikan dampak penilaian resiko tidak efektif karena semua pengeluaran aset tetap dibebankan langsung pada pengeluaran pendapatan.

Selanjutnya pada aspek aktivitas pengendalian diketahui bahwa setiap transaksi yang berhubungan dengan aset tetap baik itu perbaikan, pembelian, pelepasan kewenangannya selalu diinisiasi oleh direktur. Kelemahan lainnya pada aktivitas pengendalian ini adalah Aset tetap perusahaan tidak diberikan penomoran. Selain itu informasi dan komunikasi yang disajikan berdasarkan metode garis lurus berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) serta dilakukan secara konsisten selain itu Manajemen perusahaan tidak memberikan informasi tentang keberadaan aset tetap. Kemudian hal yang diperhatikan adalah pemantauan pengendalian berada pada pundak pimpinan yang bertanggungjawab penuh dalam usaha pengawasan internal terhadap aset tetap oleh karena itu pemanatauan juga perlu dikoodinir dengan baik.

B. ASET TETAP BANK BNI Syariah

Pengendalian asset tetap pada Bank BNI Syariah telah menciptakan ataupun menyusun suatu sistem pengendalian intern terhadap Aset tetap di mana dalam

operasinya pengelolaan dan pengendalian asset dijumpai hal-hal seperti penggunaan Cash compartment yang kuat dan dilengkapi dengan kombinasi angka yang bersifat rahasia untuk dapat membukanya.

Analisis pengendalian intern asset tetap yang diterapkan Bank BNI Syariah yaitu:

1. Unsur – unsur asset tetap yang memadai adanya pemisahan tanggung jawab dan wewenang secara fungsional pada Bank BNI Syariah yang terlihat dari struktur perusahaannya.
2. Sistem pemberian wewenang dan product pencatatan Bank BNI Syariah melaksanakan kegiatan operasional bank telah didasarkan pada buku pedoman dan intruksi intern manajemen, alat yang digunakan dalam untuk pengendalian operasi diciptakan melalui perancangan formulir yang tepat sehingga dapat jalannya pelaksanaan pengendalian intern.

C. PENYAJIAN SISTEM PENGENDALIAN ASET TETAP

1. Penyajian Sistem Pengendalian Menurut Perusahaan

Penyajian sistem pengendalian dalam suatu perusahaan dilakukan untuk mengetahui apakah tingkat resiko suatu perbankan dapat diukur atau tidak dari segi asset tetap, sehingga penting bagi manajemen mempunyai tanggung jawab dalam suatu perusahaan demi keamanan harta milik perusahaan serta menemukan dan mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan atau pemborosan pada saat perusahaan beroperasi.

2. Penyajian Sistem Pengendalian Intern Berdasarkan PSAK

Dalam pernyataan standar akuntansi (PSAK) penyajian sistem pengendalian meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi asset miliknya mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.

Sistem pengendalian intern berdasarkan PSAK terbagi atas 3 bagian yaitu Manajemen Control, Administrative Control dan Accounting Control. Oleh karena itu sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi asset, meneliti akuntansi serta mendorong efisiensi operasi dan menunjang dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan.

D. MANFAAT ADANYA SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Manfaat utama pengendalian intern, seperti dinyatakan oleh *The American Institute Of Certified Public Accountants* yaitu:

1. Melindungi asset perusahaan (yaitu sumber daya termaksud data dan informasi).
2. Memastikan ketepatan dan keandalan data dan informasi akuntansi (menjaga agar data dan informasi bebas dari kesalahan dan menyediakan hasil yang konsisten bila memproses data yang serupa).
3. Mendorong efisiensi dari semua operasi perusahaan.
4. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan manajemen.

Manfaat pengendalian intern yang disebut diatas skar dicapai sepenuhnya, salah satu kesulitan yang disebabkan oleh kompleksitas dan perubahan cepat yang dihadapi perusahaan.

Kesukaran lainnya adalah adanya serangkaian risiko yang dihadapi struktur pengendalian intern dan perusahaan. Sebagai contoh data mungkin saja diakses oleh orang yang tidak berhak. Kesulitan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi komputer dalam struktur pengendaliannya. Adanya karyawan yang tidak mematuhi prosedur secara konsisten, dan kesulitan yang terakhir yaitu, kesulitan yang berkaitan dengan masalah biaya.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Sistem Pengendalian Intern atas Aset Tetap pada BANK BNI Syariah Cabang Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian selain menekankan peningkatan kapasitas SDM juga menekankan komite audit untuk memberikan pengawasan ganda terhadap aktivitas perusahaan menyangkut tata tertib prosedur sehingga mempengaruhi penyajian informasi laporan karena kemungkinan untuk kesalahan pencatatan dan sangat tinggi.
2. pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai jika terdapat perubahan yang signifikan, baik dalam penggunaan aktiva atau perubahan dalam lingkungan bisnis tidak pernah dilakukan.
3. Aktivitas pengendalian diketahui bahwa setiap transaksi yang berhubungan dengan aset tetap baik itu perbaikan, pembelian, pelepasan kewenangannya selalu diinisiasi oleh direktur.
4. Informasi dan komunikasi yang disajikan berdasarkan metode garis lurus berdasarkan PSAK serta dilakukan secara konsisten selain itu Manajemen perusahaan tidak memberikan informasi tentang keberadaan aset tetap.
5. Pemantauan pengendalian berada pada pundak pimpinan yang bertanggungjawab

penuh dalam usaha pengawasan internal terhadap aset tetap.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap agar jumlah atau nilai aset tetap yang dilaporkan teruji kebenarannya.
2. Manajemen perlu memperhatikan dan menentukan cara yang baik dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien agar pelaksanaan prosedur-prosedur pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Perlunya pemberian nomor agar memudahkan pengawasan terhadap aset tetap agar pemeriksaan fisik terhadap aset tetap dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2012, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anggreini, 2012:10 "Pengendalian internal" Jakarta: PT Raja Grafindo
- Baridwan, Zaki. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Hall, James A. 2007. *Sistem Informasi Akuntansi*. Ed.4. Jakarta: Salemba Empat
- JMV. Mulyadi, *Penilaian Efisiensi Bank dengan Data Envelopment Analisis pada 10 Bank Berperingkat Besar di Indonesia*, Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol.2 No. 2, Desember 2015, hal 113-126
- Karim, Adiwarmanto A. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: AMP YKPN
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyadi (2014:164) "Unsur Pengendalian Internal" Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Nurmala, *Analisa Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Griya BNI pada BNI LNC Palembang*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 12, No 2, Juli 2015:40-50
- _____. 2008. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Sutabri, Tata. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Suyatno, Thomas, dkk. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

RIWAYAT HIDUP



RIZAL ,. Lahir di Tahebatu pada Tanggal 20 juli 1993, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, anak pertama dari enam bersaudara. Buah kasih pasangan dari Ayahanda **“Syahiruddin”** dan Ibunda **“Jusni”** Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur (6) tahun di Sekolah Dasar (SD) Pada SDN 290 tahebatu dan selesai Pada Tahun 2004, dan Pada Tahun yang Sama penulis melanjutkan di sekolah menengah pertama (SMP) Pada SMP Negeri 3 Caramming dan Selesai pada tahun 2007, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Pada SMA 1 Bontotiro . Penulis mengambil jurusan akuntansi dan selesai pada tahun 2010, dan pada saat itu saya sempat menganggur selama 3 tahun dan pada tahun 2013 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta di makassar sebagai Jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya yaitu pada tahun 2018.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha disertai doa dari kedua orangtua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi swasta di Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “ Sistem Pengendalian Intern Atas Asset Tetap Pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar”.